



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI  
INSPEKTORAT JENDERAL

# LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# 2023

PROFESIONAL - INTEGRITAS - AMANAH





**“  
Pengawasan intern yang berkualitas dan konvergen akan mendukung percepatan konektivitas yang tepat sasaran untuk  
”**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu gambaran mengenai keberhasilan kinerja serta dapat menjadi alat analisis terhadap kegagalan, sehingga dapat menjadi umpan balik dalam upaya peningkatan kinerja yang lebih baik di periode berikutnya.

Penyusunan LKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2023 Inspektorat Jenderal telah menetapkan tiga Sasaran Program (SP) dengan enam Indikator Kinerja Program (IKP) yang dijadikan dasar penetapan kontrak kerja antara Inspektur Jenderal dengan Menteri Perhubungan. Pada akhir periode capaian SP yang dicerminkan dari capaian IKP menunjukkan kinerja yang optimal diman realisasi rata-rata capaian kinerja sebesar 105,77%.

Laporan Kinerja tahun 2023 ini disusun mengacu pada indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024, serta berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar stakeholders yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dan menjadi umpan balik bagi kami untuk mendorong peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Inspektorat Kementerian Perhubungan akan terus berupaya memberikan kontribusi yang positif dan bermakna nyata demi memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.

Jakarta, Februari 2024

Arif Toha Tjahjagama  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 196703201992031003



Laporan Kinerja tahun 2023 ini disusun mengacu pada indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal 2020-2024, serta berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar stakeholders yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dan menjadi umpan balik bagi kami untuk mendorong peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Inspektorat Kementerian Perhubungan akan terus berupaya memberikan kontribusi yang positif dan bermakna nyata demi memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.

Jakarta, Februari 2024

Arif Toha Tjahjagama  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 196703201992031003

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Dikonsep	Citra Vidya Hartini	Penyusun Laporan dan Evaluasi		
2	Diperikas	Dr. Maizar Radjin, S.E., M.Ak., QIA, QRMA., CRGP.	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi		
		Amin Hudaya, S.T., M.T.	Inspektur I		
		Amin Hudaya, S.T., M.T.	Plt. Inspektur II		
		Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	Inspektur III		
		Capt. Sahattua P. Simatupang, M.M., M.H., CGCAE	Inspektur IV		
		Wasis Danardono, S.Psi., MBA, QIA	Inspektur Investigasi		
3	Disetujui	Joko Murdyono, S.E., MAB	Sekretaris Inspektorat Jenderal		



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	<b>iv</b>
<b>EXECUTIVE SUMMARY</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	2
1.2 Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal .....	2
1.3 Sumber Daya Manusia .....	4
1.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan .....	7
1.5 Sistematisasi Penyajian .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022</b>	<b>9</b>
2.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis .....	10
2.1.1. Arah Kebijakan .....	10
2.1.2. Strategi .....	13
2.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 .....	15
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	15
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>17</b>
3.1 Tahapan Pengukuran Kinerja .....	18
3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahunan .....	19
3.2.1 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023 .....	19
3.2.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 .....	20
3.2.3 Perbandingan Target Kinerja dengan Target Rencana Strategis .....	22
3.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Kinerja serta Alternatif Solusi .....	23
3.2.5 Analisis Efisiensi Sumber Daya .....	32
3.3 Realisasi Anggaran .....	32
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>34</b>
4.1 Kesimpulan .....	35
4.2 Saran Tindak Lanjut .....	36
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN</b>	<b>37</b>





## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 .....	15
<b>Tabel 2.2</b>	Perjanjian Kinerja 2023 .....	16
<b>Tabel 3.1</b>	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023 .....	19
<b>Tabel 3.2</b>	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 .....	20
<b>Tabel 3.3</b>	Perbandingan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024 .....	22
<b>Tabel 3.4</b>	Hasil Evaluasi Ex Ante .....	26
<b>Tabel 3.5</b>	Hasil Evaluasi On Going .....	26
<b>Tabel 3.6</b>	Pagu Anggaran dan Pagu Efektif Inspektorat Jenderal per Unit Kerja .....	32
<b>Tabel 3.7</b>	Pagu Akhir Inspektorat Jenderal per Unit Kerja .....	33
<b>Tabel 3.8</b>	Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal per Jenis Belanja .....	33

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b>	Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal .....	3
-------------------	--	---

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 1.1</b>	Komposisi SDM Berdasarkan Golongan.....	4
<b>Grafik 1.2</b>	Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan .....	4
<b>Grafik 1.3</b>	Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan .....	5
<b>Grafik 1.4</b>	Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin .....	6
<b>Grafik 3.1</b>	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 .....	21



# EXECUTIVE SUMMARY

## CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2023

Nilai Rata-rata  
Capaian Indikator Kinerja

**105,77%**

Atas 3 SP dan 6 IKP

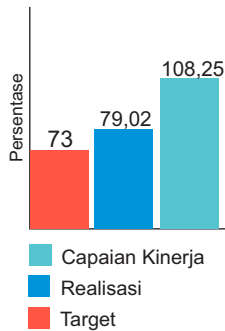
Realisasi Anggaran  
31 Desember 2023

**99,98%**

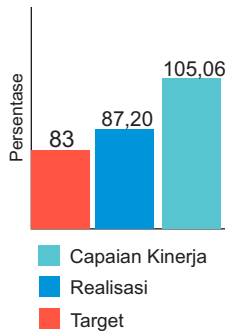
Rp101.794.194.080,-

### Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah

Dukungan Pengawasan  
terhadap Opini BPK atas  
Laporan Keuangan  
Kementerian Perhubungan

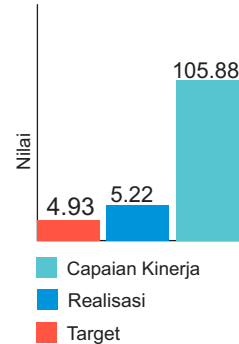


Persentase  
Rekomendasi LHP BPK  
yang ditindaklanjuti



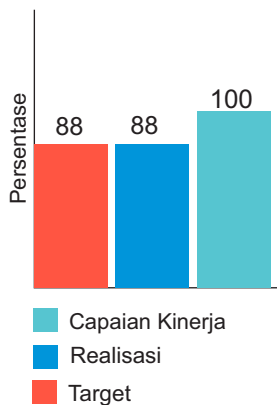
### Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Nilai Area Penguatan  
Pengawasan  
Reformasi Birokrasi

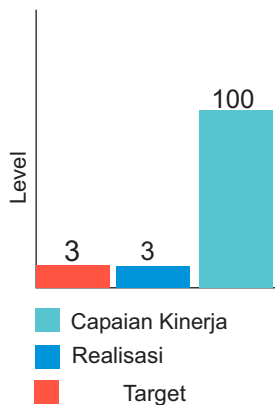


### Meningkatnya Layanan Pengawasan

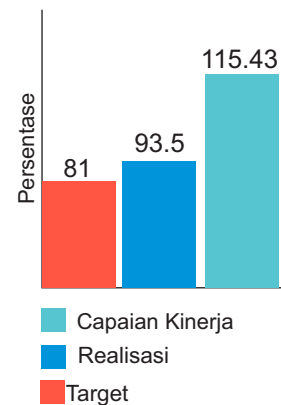
Tingkat Kepuasan  
Pengawasan oleh Auditi



Tingkat Kapabilitas Aparat  
Pengawasan Intern  
Pemerintah (IACM)



Persentase  
Penyelesaian





## EXECUTIVE SUMMARY

### CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2023



Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja

# 105,77 %

Atas 3 SP dan 6 IKP

Realisasi Anggaran 31 Desember 2023

# 99,98 %

Sebesar Rp101.794.194.080,-

Pengawasan Intern  
yang Memberikan Nilai Tambah

Dukungan Pengawasan  
terhadap Opini BPK atas  
Laporan Keuangan Kementerian  
Perhubungan

Capaian Kinerja 2023

## 108,25 %

atau 79,02

dari Target sebesar 73

Persentase Rekomendasi  
LHP BPK yang  
ditindaklanjuti

Capaian Kinerja 2023

## 105,06 %

atau 87,20

dari Target sebesar 83

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola  
Pemerintahan yang Baik

Nilai Area Penguatan  
Pengawasan Reformasi  
Birokrasi Kementerian  
Perhubungan

Capaian Kinerja 2023

## 105,88 %

atau 5,22

dari Target sebesar 4,93

Meningkatnya Layanan  
Pengawasan

Tingkat Kepuasan  
Pengawasan oleh

Capaian Kinerja 2023

## 100 %

atau 88

dari Target sebesar 88

Tingkat Kapabilitas Aparat  
Pengawasan Intern

Capaian Kinerja 2023

## 100 %

atau 3

dari Target sebesar 3

Persentase Penyelesaian  
Penanganan Pengaduan

Capaian Kinerja 2023

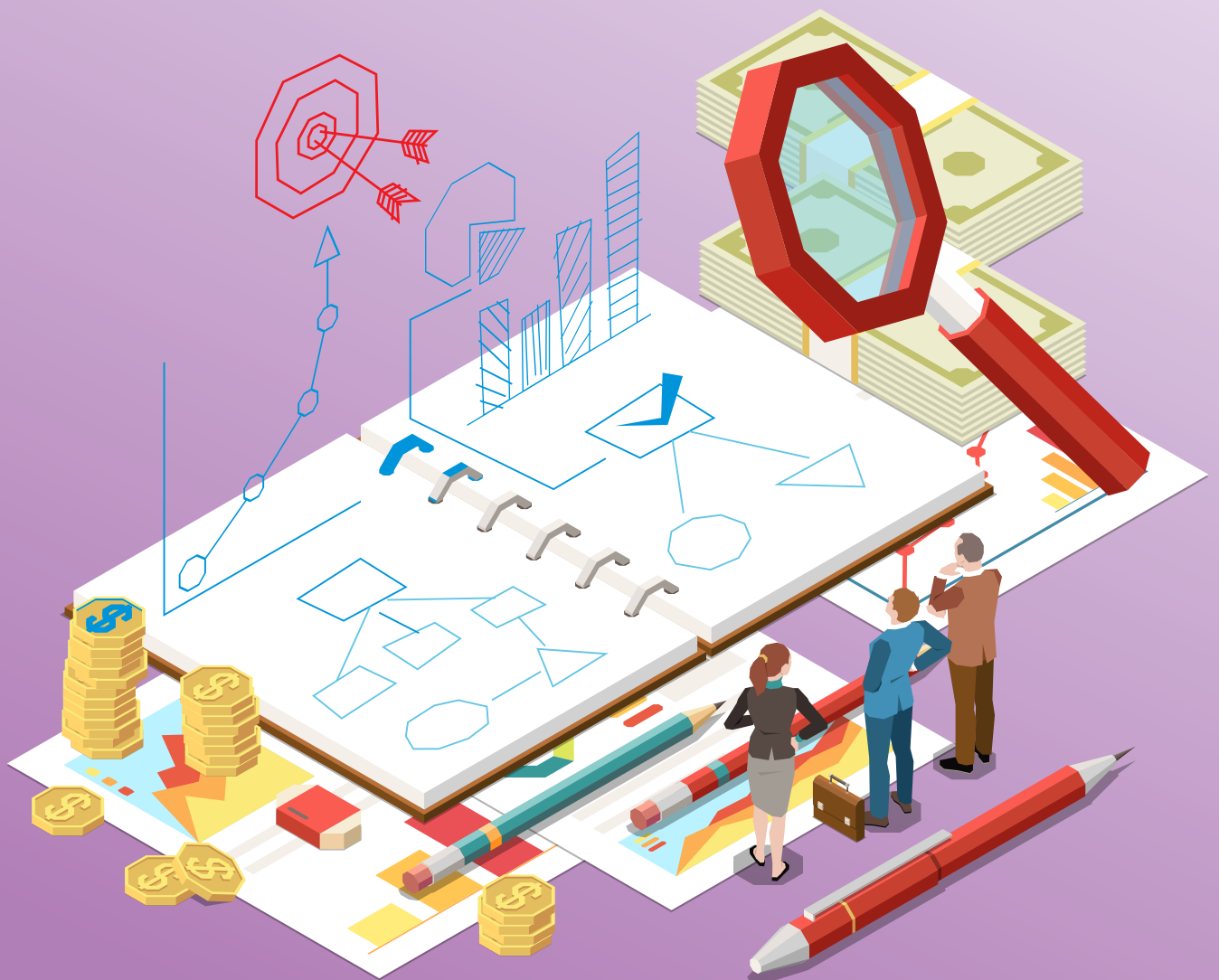
## 115,43 %

atau 93,5

dari Target sebesar 81

# BAB I

# PENDAHULUAN





## 1.1 LATAR BELAKANG

Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas atau disebut dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan dimulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Mengacu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dijelaskan bahwa Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan diwajibkan menyusun rencana kinerja jangka pendek dan melakukan pengukuran capaian kinerja serta menyampaikannya dalam bentuk dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dari kebijakan dan program sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Maka sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Inspektorat Jenderal atas penggunaan anggaran dan wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal tahun 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal tahun 2023 pada dasarnya untuk mengetahui keberhasilan target kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung Sasaran Program Inspektorat Jenderal perlu dilakukan pengukuran capaian kinerja pada tiap-tiap Indikator Kinerja Program, capaian kinerja (performance result) tahun 2023 tersebut, kemudian akan dibandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahunan, selanjutnya hasil analisis pengukuran capaian kinerja akan menjadi tolok ukur keberhasilan dan sarana dalam mengidentifikasi sejumlah kelemahan kinerja (performance gap) yang dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

## 1.2 TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL

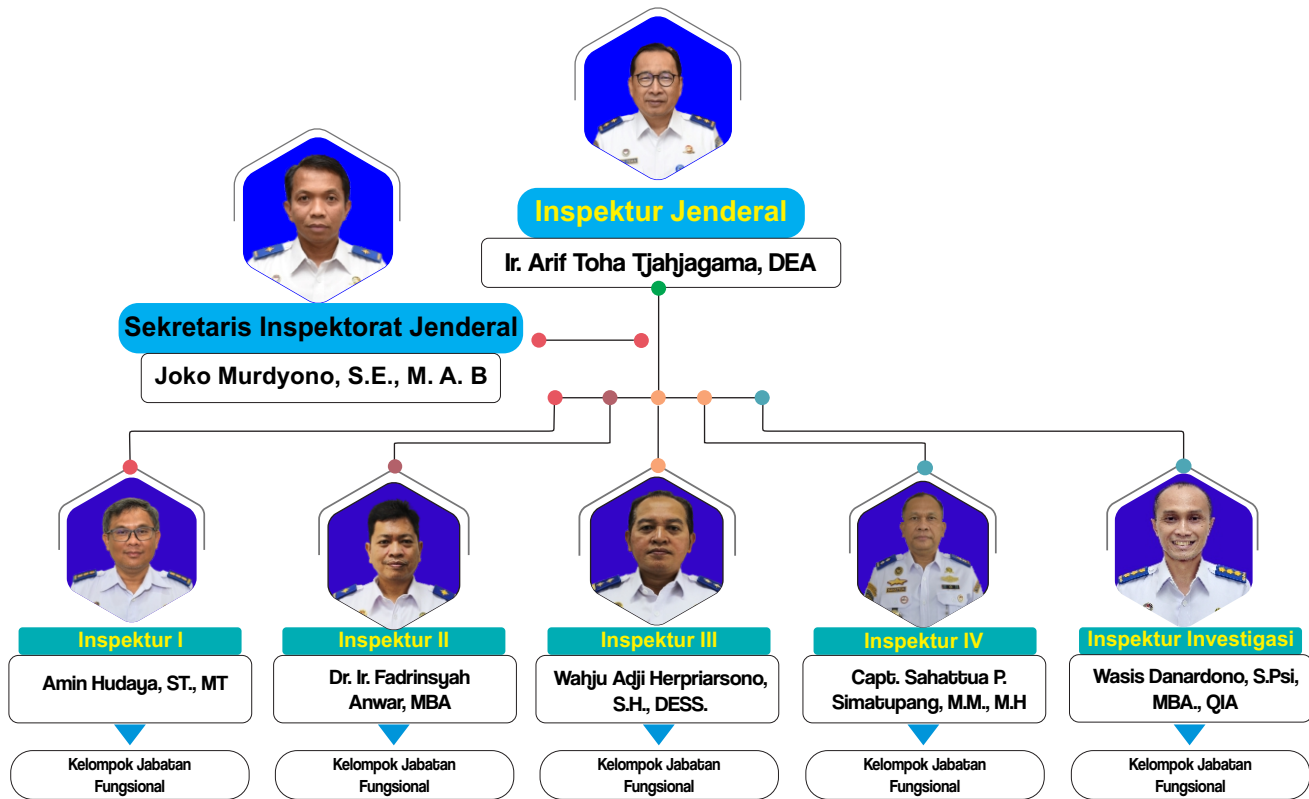
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sesuai tugas pokoknya Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Inspektorat Jenderal yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal, mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 576, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- 01 Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan
- 02 Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
- 03 Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perhubungan;
- 04 Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 05 Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal
- 06 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan

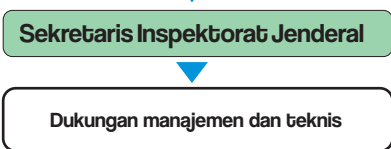


Susunan organisasi Inspektorat Jenderal sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagai berikut:



**Gambar 11.**  
Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal

**Inspektorat Jenderal memiliki dua kerangka utama**

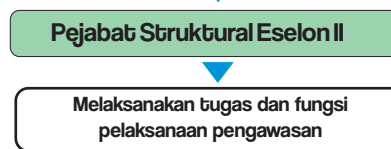


Penyiapan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, manajemen risiko, pengelolaan data dan teknologi informasi, pelaksanaan kepatuhan dan pengendalian internal, serta

Penyiapan pengelolaan urusan sumber daya manusia dan organisasi, pemantauan pelaporan harta kekayaan aparatur Kementerian Perhubungan, pengelolaan reformasi birokrasi, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan, serta urusan ketabusahaan Inspektorat Jenderal;

Penyiapan pengelolaan keuangan, pengadaan dan pengelolaan Barang Milik Negara, pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pelaksanaan keprotokolan

Penyiapan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan internal dan eksternal, pelaksanaan urusan hukum, hubungan masyarakat, serta monitoring dan koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi Kementerian Perhubungan



**Inspektur I**  
Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Kebijakan Transportasi, dan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

**Inspektur I**  
Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

**Inspektur I**  
Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

**Inspektur I**  
Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Inspektorat Jenderal.

**Inspektur Investigasi**  
Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern ndikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, tindak lanjut pengaduan masyarakat, pengawasan untuk tujuan tertentu, dan penugasan lain yang berdasarkan instruksi khusus Menteri Perhubungan dan/atau Inspektur Jenderal, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.





### 1.3 SUMBER DAYA MANUSIA

339

Total Pegawai

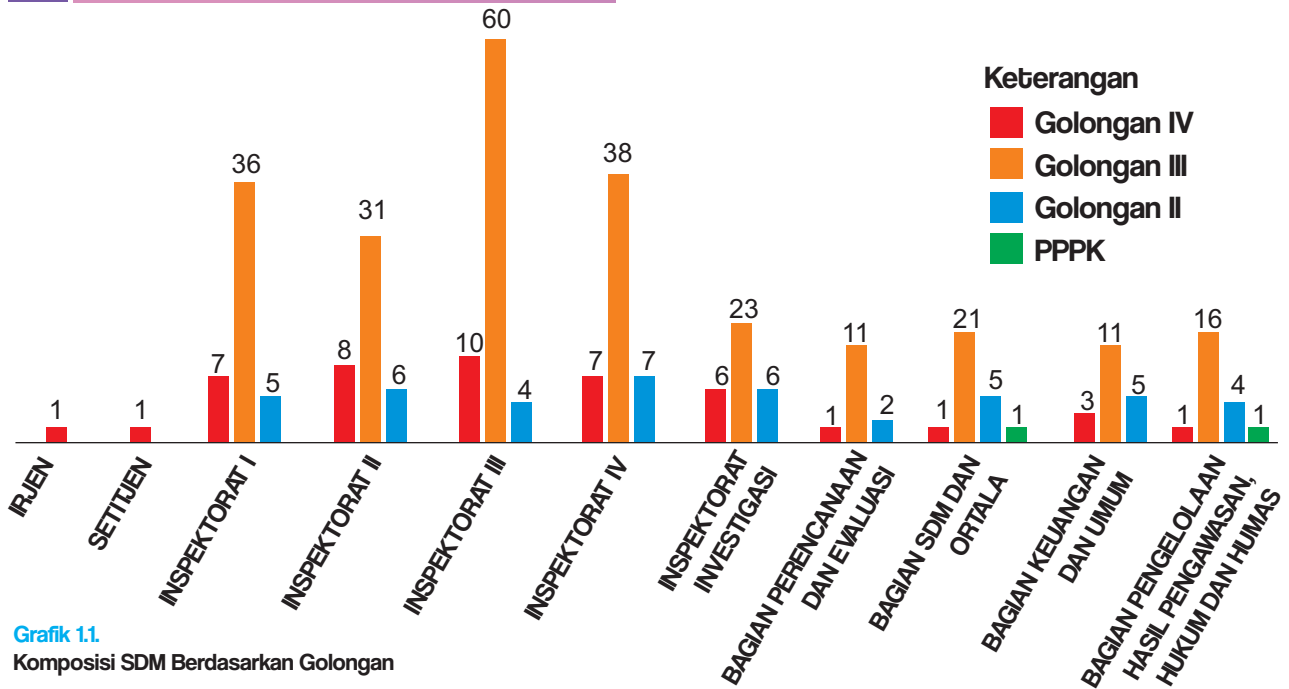
337

PNS

2

PPPK

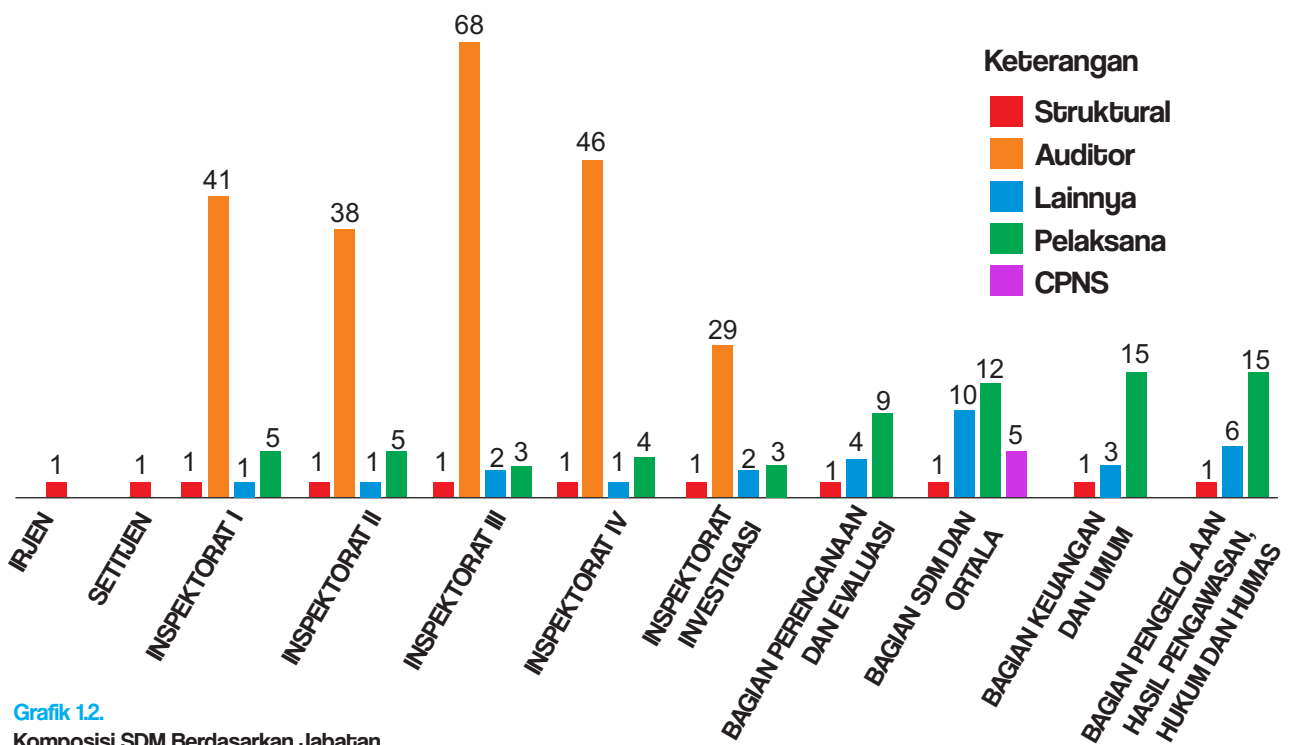
#### A RINCIAN SDM BERDASARKAN GOLONGAN



Grafik 1.1.

Komposisi SDM Berdasarkan Golongan

#### B RINCIAN SDM BERDASARKAN JABATAN



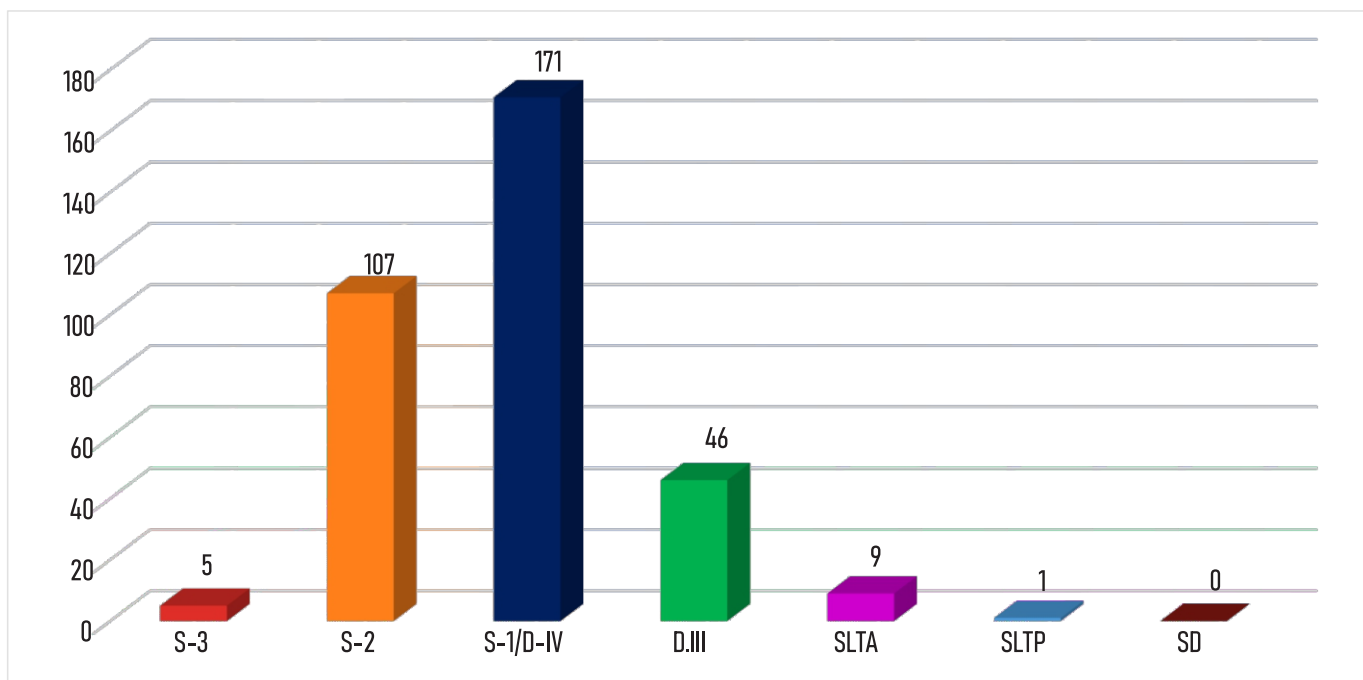
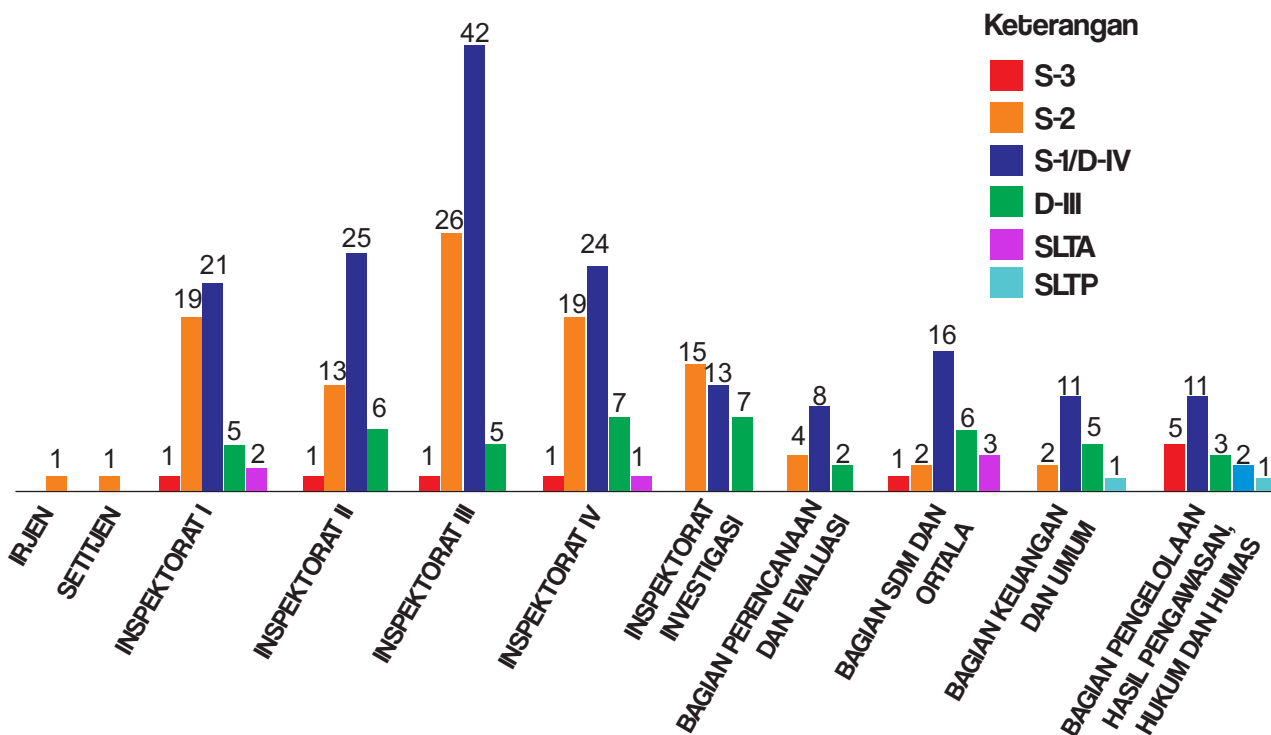
Grafik 1.2.

Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan





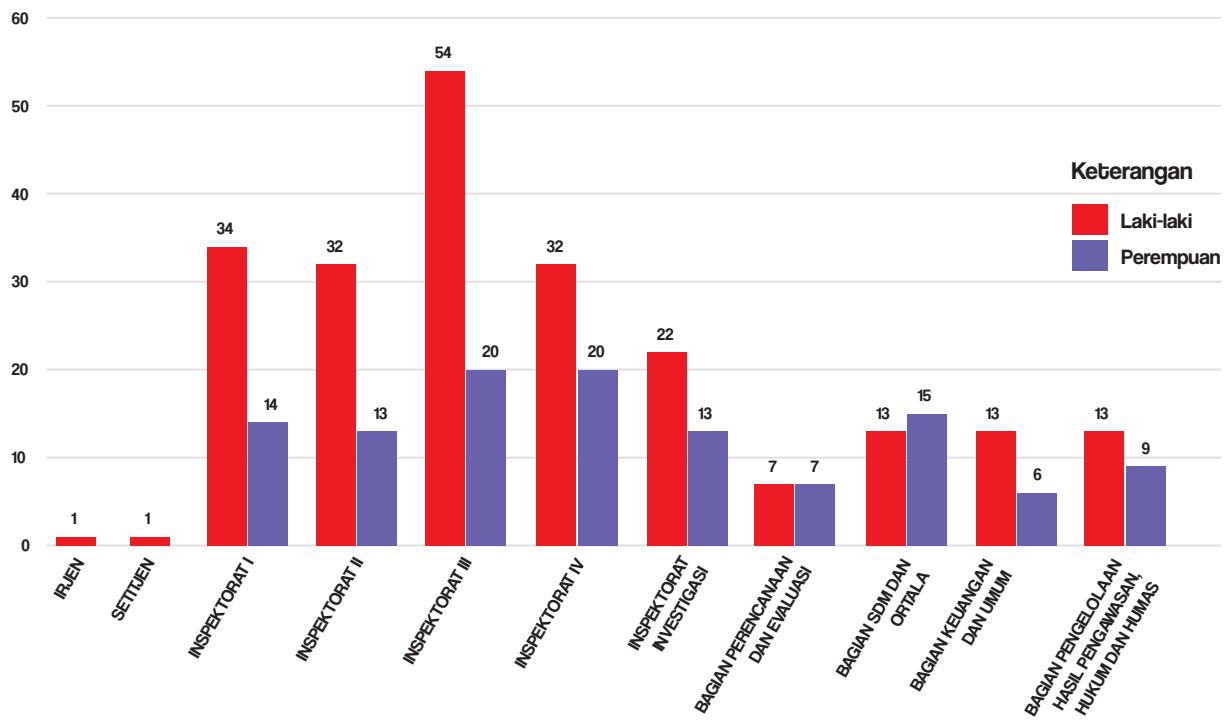
### C RINCIAN SDM BERDASARKAN PENDIDIKAN



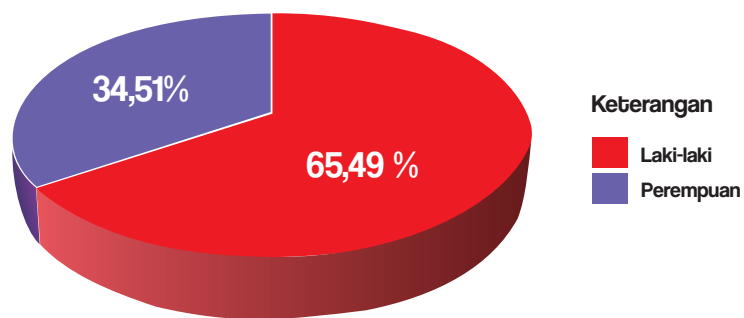
Grafik 13.  
Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan



**D RINCIAN SDM BERDASARKAN JENIS KELAMIN**



**Komposisi Pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan(Berdasarkan Jenis Kelamin)**



**Grafik 1.4.**  
Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin



## 1.4 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Sebagai bentuk komitmen pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan fungsi pengawasan yang lebih kompeten, agile serta efisien. Dalam memberikan jasa Asuransi dan Konsultasi serta menjadi early warning bagi stakeholders atau auditi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pada tahun 2023 kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal telah didukung dengan anggaran, sarana dan prasarana pengawasan, dan pengembangan kompetensi yang memadai, namun terdapat beberapa potensi, isu strategis serta permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian khusus sebagai berikut:

### A. Potensi

- Jumlah auditor yang memiliki sertifikasi keahlian
- Jumlah pejabat fungsional umum dan tertentu diluar jabatan auditor sebagai pendukung layanan di Inspektorat Jenderal
- Perkembangan teknologi yang mendukung digitalisasi dalam pelaksanaan proses bisnis di lingkungan Inspektorat Jenderal.
- Dukungan dan komitmen pimpinan terhadap peningkatan kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal
- Struktur organisasi yang telah disesuaikan kembali dari pengawasan per wilayah menjadi per matra agar pengawasan menjadi lebih fokus dan mendalam
- Dibentuknya tim kerja di masing-masing unit kerja yang secara spesifik melaksanakan tugas dan fungsi tertentu

### B. Isu Strategis

- Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan dimana Inspektorat Jenderal menjadi pilot project dalam implementasi Manajemen Risiko
- Pelaksanaan kegiatan Audit Kinerja Berbasis Risiko, dimana perencanaan kegiatan pengawasan pada tahun berjalan menggunakan profil risiko dari masing-masing unit kerja;
- Peningkatan layanan consulting melalui kegiatan pengawasan diluar audit yang meliputi reviu, evaluasi, konsultasi
- Sinergitas pengawasan antara Inspektorat Jenderal, BPK RI, dan BPKP serta pengawasan terhadap Dana Alokasi Khusus, P3DN, dan SBSN.

### C. Permasalahan

- Terdapat kerangka regulasi yang belum diterbitkan maupun dilakukan penyesuaian kembali salah satu contohnya adalah revisi KM 41 tentang Unit Kepatuhan Internal sehubungan dengan terbitnya KM 69 tentang Manajemen Risiko
- Ketersediaan Teknologi Informasi dalam mendukung kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal masih belum dipergunakan dengan optimal;
- Terdapat pemotongan anggaran Inspektorat Jenderal sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal.



## 1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal (LAKIP) Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yaitu sebagai berikut :



# BAB II

# PERENCANAAN

# KINERJA

INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENHUB





## 2.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024 ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.102/PS.302/ITJEN-2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024. Pada tanggal 30 Desember 2022 telah ditetapkan Revisi Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024 melalui Keputusan Inspektur Jenderal Nomor KP-ITJEN 96 Tahun 2022.

### 2.1.1 Arah Kebijakan



1

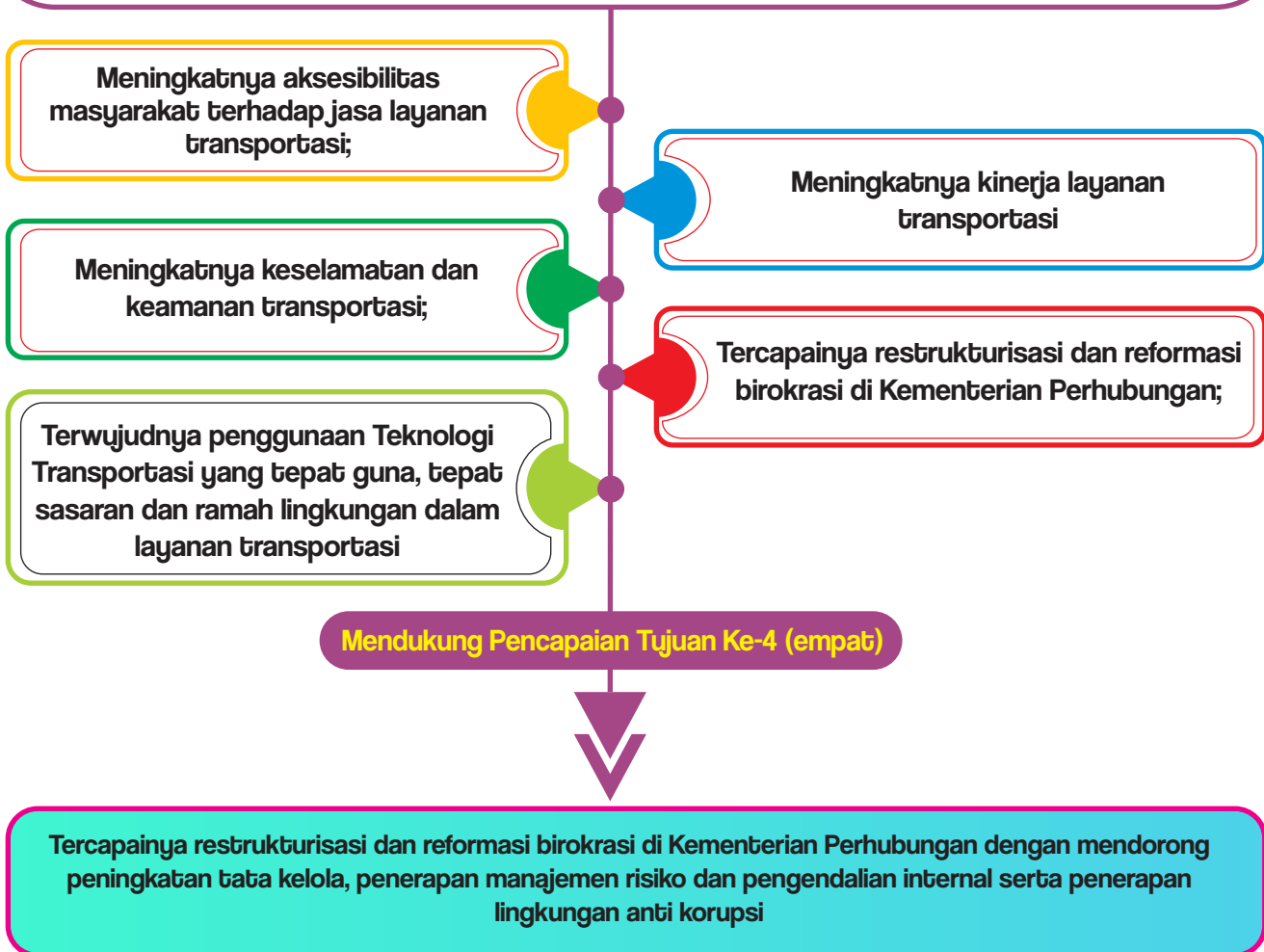
#### Arah Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal terkait Prioritas Nasional Pembangunan Sektor Transportasi





2

## Arah Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal terkait Pencapaian Tujuan Kementerian Perhubungan



### Fokus Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal

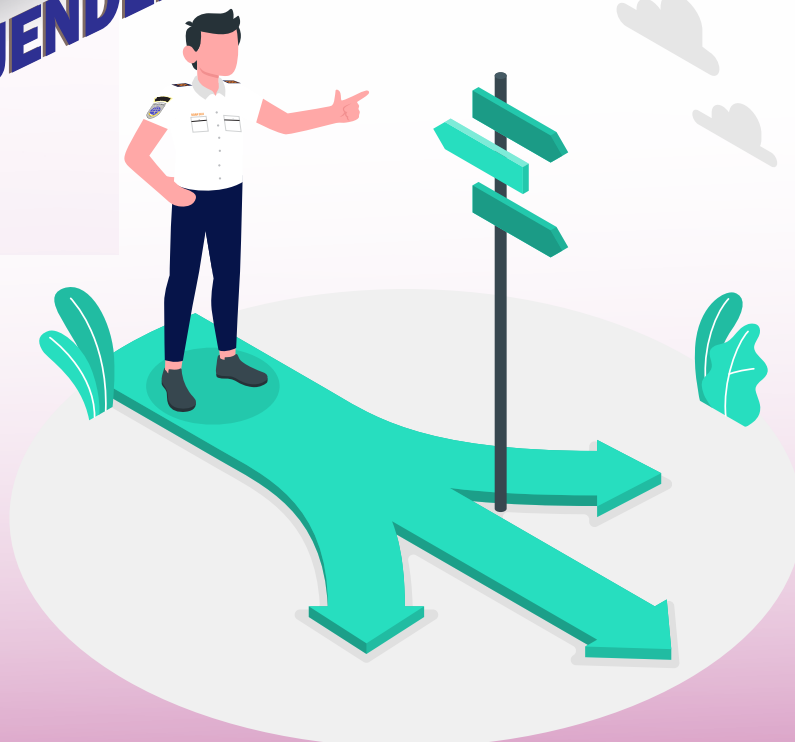
- Pengawasan atas penyusunan APBN terkait belanja negara (BA.022 dan BA-BUN) yang berbasis kinerja, pelaksanaan belanja yang berkualitas dan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel melalui kegiatan reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), reviu Laporan Keuangan, dan pendampingan atas pemeriksaan BPK;
- a >>> Pengawasan atas penyusunan kebijakan dan pedoman tentang mekanisme pelaksanaan belanja APBN, program padat karya dan pengelolaan APBN pada masa pandemi melalui Fraud Management System;
- b >>> Pengawasan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui kegiatan reviu HPS, reviu standar biaya teknis, reviu usulan e-Katalog, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);
- c >>> Pengawasan atas pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui sinergi Aparat Pengawasan Intern K/L/Pemerintah Daerah;
- d >>> Pengawasan atas pengelolaan dan pemanfaatan asset negara melalui kegiatan reviu RK-BMN, reviu reval BMN dan evaluasi pemanfaatan asset;
- e >>> Pengawasan atas perizinan dan tata kelola pelayanan publik;
- f >>> Pengawasan atas pengelolaan penerimaan pajak belanja pemerintah, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU);
- g >>>



**Lanjutan : Fokus Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal**

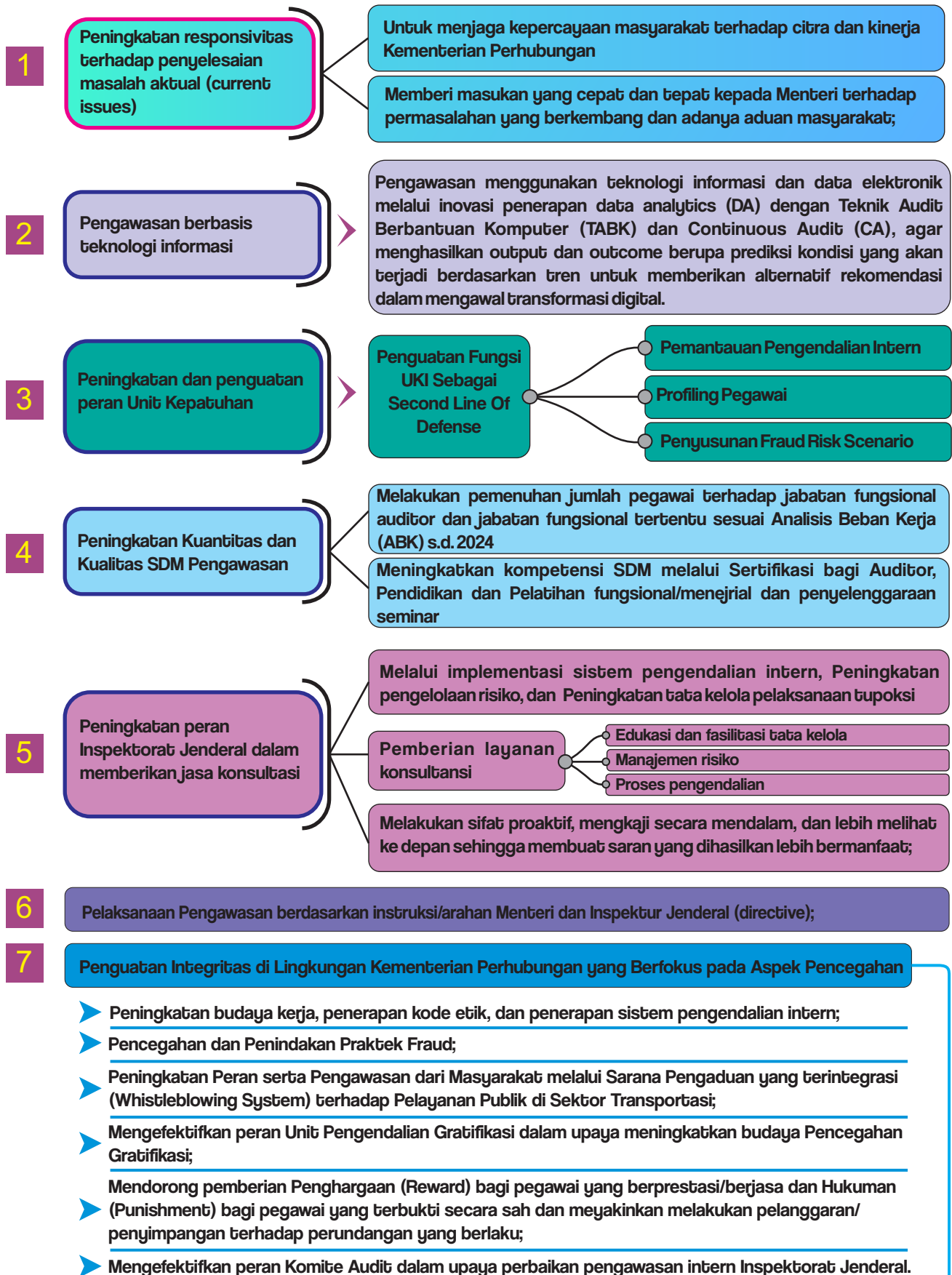
- h** >> Pengawasan atas implementasi SAKIP melalui reviu Laporan Kinerja dan evaluasi SAKIP di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- i** >> Pengawasan atas implementasi Reformasi Birokrasi melalui kegiatan penilaian mandiri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Kementerian Perhubungan;
- j** >> Pengawasan atas implementasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- k** >> Pengawasan atas indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur Kementerian Perhubungan melalui kegiatan audit investigasi, evaluasi penanganan whistleblowing system di lingkungan Kementerian Perhubungan, pelaksanaan survei integritas, pengendalian gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan, pengelolaan dan penanganan atas pengaduan masyarakat;
- l** >> Pengawasan atas pengembangan SDM Transportasi yang unggul dan kompeten melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Perhubungan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna (SIPENCATAR) Jalur Pola Pembibitan dan Non Pola Pembibitan, serta evaluasi pelaksanaan pendidikan vokasi;
- m** >> Evaluasi atas kinerja pengawasan internal melalui survey kepuasan pengawasan;
- n** >> Evaluasi atas perbaikan tata kelola, penerapan manajemen risiko, dan pengendalian intern dengan menggunakan pendekatan sistematis berbasis teknologi informasi

**ARAH KEBIJAKAN  
INSPEKTORAT JENDERAL**





## 2.1.2 Strategi





8

**Peningkatan koordinasi melalui Sinergi Pengawasan dengan sesama APIP Kementerian/Lembaga, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum, dan instansi terkait lainnya**

- ▶ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dalam pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK.
- ▶ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam pelaksanaan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK), pengendalian gratifikasi, serta kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
- ▶ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dalam pelaksanaan supervisi implementasi SPIP, penilaian Level Maturitas SPIP, penilaian kapabilitas pengawasan intern (IACM), pelaksanaan pengawasan P3DN, pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, dan kerja sama pengawasan internal lainnya.
- ▶ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), evaluasi dan reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
- ▶ Inspektorat Prov./Kab./Kota dalam Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Transportasi dan kerja sama pengawasan internal lainnya.
- ▶ Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan Agung, terkait dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi, pemberantasan pungutan liar dan kerja sama lainnya dalam rangka tindak lanjut upaya penegakan hukum

9

**Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance),**

- ▶ Peningkatan akuntabilitas kinerja, agar mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik dan berorientasi pada kinerja (outcome).
- ▶ Kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran (right sizing), guna mewujudkan organisasi yang agile, efektif, efisien, memperpendek rentang kendali (spin of control) dan tidak membebani anggaran.
- ▶ Penguatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), melalui kegiatan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja termasuk akuntabilitas keuangan negara.
- ▶ Mendorong kelengkapan dan pelaksanaan secara konsisten Standard Operating Procedures (SOP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya.

10

**Peningkatan kapabilitas pengawasan intern**

- ▶ Sesuai kriteria IACM pada level tiga penuh (integrated) peran Inspektorat Jenderal sudah mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern
- ▶ Pada tahun 2024 ditargetkan sudah mencapai level empat (managed) dengan memulai pembangunan kapabilitas pengawasan intern melalui fungsi pengawasan yang sudah dapat memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.
- ▶ Melaksanakan pengawasan intern berdasarkan Standar Audit Auditor Intern dan Kode Etik yang berlaku, dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas penerapan standar audit pada setiap kegiatan pengawasan intern dalam rangka menjaga penjaminan kualitas dan program perbaikan yang mencakup seluruh aspek kegiatan APIP untuk meyakinkan bahwa APIP telah bekerja sesuai standar dan kode etik profesi.



## 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

Pada akhir tahun 2022 Inspektorat Jenderal telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 dengan menetapkan 3 (tiga) SP yang diukur dengan 6 (enam) IKP, RKT tersebut disusun sebagai dasar penyusunan kegiatan dan penganggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023 dengan memperhatikan perkembangan kegiatan di tahun 2023.

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target	
SP 1	Pengawasan Intern yang Memberikan nilai tambah	IKP 1	Dukungan Pengawasan Terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	%	73
		IKP 2	Persentase Rekomendasi LHP BPK Yang ditindaklanjuti	%	83
SP 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 3	Nilai Area Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Nilai	4,93
SP 3	Meningkatnya Layanan Pengawasan	IKP 4	Tingkat Kepuasan Pengawasan Oleh Auditi	%	73
		IKP 5	Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	Level	3
		IKP 6	Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan	%	81

Tabel 21

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

## 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Rencana Strategis menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahunan.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau dilakukan penyesuaian dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a** Pergantian atau mutasi pejabat;
- b** Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan rencana strategis, struktur organisasi, program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c** Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pada tanggal 31 Juli 2023 Inspektorat Jenderal telah melakukan revisi Perjanjian Kinerja dikarenakan terdapat perubahan pimpinan, namun tidak merubah target kinerja serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.



No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)		Satuan	Target
SP 1	Pengawasan Intern yang Memberikan nilai tambah	IKP 1	Dukungan Pengawasan Terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	%	73
		IKP 2	Persentase Rekomendasi LHP BPK Yang ditindaklanjuti	%	83
SP 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 3	Nilai Area Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Nilai	4,93
SP 3	Meningkatnya Layanan Pengawasan	IKP 4	Tingkat Kepuasan Pengawasan Oleh Auditi	%	73
		IKP 5	Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	Level	3
		IKP 6	Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan	%	81

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2023



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

**INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENHUB**

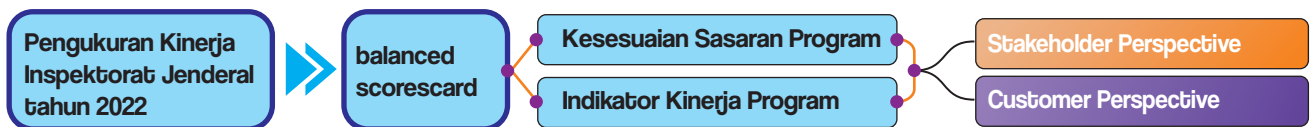




Akuntabilitas Kinerja Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh unit kerja eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal. Pencapaian kinerja didasarkan atas perjanjian kinerja seluruh level di lingkungan Inspektorat Jenderal dan telah dilakukan pengukuran dan pengelolaan data kinerja perbulan secara elektronik yang berbasis website melalui aplikasi e-performance, serta dilaporkan melalui Laporan Monitoring Capaian Kinerja secara triwulanan.

### 3.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

Perhitungan persentase capaian kinerja di lingkungan inspektorat jenderal menggunakan indikator kinerja maximize, yaitu apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:



#### 1 Stakeholder Perspective

Sasaran Program pertama (SP 1) yaitu Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah

**01 | IKP 1**

Dukungan Pengawasan terhadap Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan

**02 | IKP 2**

Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti, dengan rumusan yang dipakai sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi Sesuai}}{\sum \text{Rekomendasi Temuan}} \times 100\%$$

#### 2 Customer Perspective

**01 | SP 2**

SP 2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik, dengan Indikator Kinerja Program (IKP) 3 yaitu Nilai Area Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan.

**02 | SP 3**

**IKP 4 Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi**

$$\frac{\sum \text{Responden yang puas}}{\sum \text{Total Responden}} \times 100\%$$

**IKP 5 Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)**  
Menggunakan hasil evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

**IKP 6 Persentase Penyelesaian Penanganan**

$$\frac{\sum \text{Pengaduan yang selesai di tindaklanjuti}}{\sum \text{Total Pengaduan}} \times 100\%$$



## 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahunan

Perbandingan-perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja dalam kurun waktu tertentu, serta melakukan analisis atas keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja serta efisiensi penggunaan sumber daya, pengukuran capaian kinerja tahunan dijelaskan sebagai berikut.

### 3.2.1 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023



Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023

**105,77 %**

Atas 3 SP dan 6 IKP

Realisasi kinerja capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2023 terhadap target kinerja yang telah ditetapkan adalah sebesar 105,77% secara rinci dijabarkan dalam tabel berikut :

No	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah</b>					
1	Dukungan Pengawasan terhadap Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	%	73	79,02	108,25
2	Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	%	83	87,20	105,06
<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>					
3	Nilai Area Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Nilai	4,93	5,22	105,88
<b>Meningkatnya Layanan Pengawasan</b>					
4	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	%	88	88	100
5	Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	Level	3	3	100
6	Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan	%	81	93,5	115,43
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>105,77</b>

Tabel 31

Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023



### 3.2.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Realisasi kinerja tahunan merupakan capaian kinerja jangka pendek dari periode Rencana Strategis Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024, perbandingan rencana kinerja tahun 2022 dan 2023 adalah untuk menggambarkan peningkatan/penurunan capaian kinerja, perubahan indikator kinerja, serta target kinerja dan kendala yang dihadapi, perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Program (IKP) 2020	Target	Capaian Kinerja	
			Realisasi	%
<b>Terwujudnya Pengawasan dan Pengendalian Intern yang Memberikan Nilai Tambah</b>				
1	Rata-rata Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	WTP	WTP	100
2	Indeks Kepuasan Pengawasan oleh Auditi (Pemangku Kepentingan)	4	4	100
<b>Kepuasan Auditi yang Tinggi</b>				
3	Indeks Kepuasan Pengawasan oleh Auditi (Pegguna Layanan)	4	4	100
<b>Kepatuhan Auditi yang Tinggi</b>				
4	Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	70	78,2	111,71
5	Persentase Rekomendasi LHA Kinerja ITJEN yang ditindaklanjuti	85	87,36	102,78
6	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	100	87,13	87,13
<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>100,27</b>

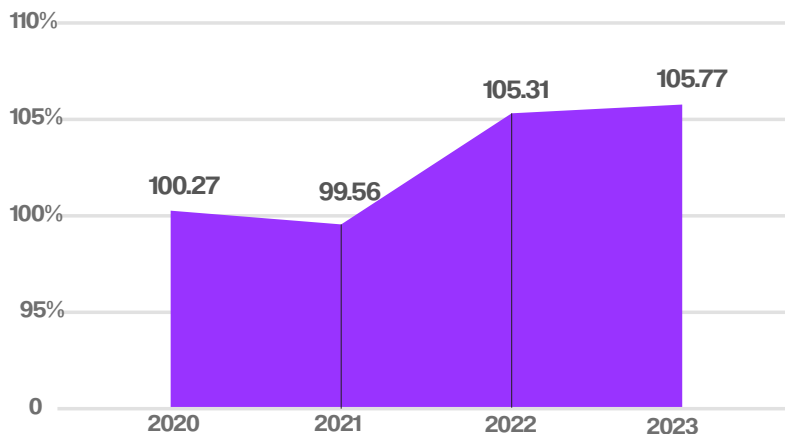
No	Indikator Kinerja Program (IKP) 2021	Target	Capaian Kinerja	
			Realisasi	%
<b>Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah</b>				
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	WTP	WTP	100
<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>				
2	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	77,5	89,67	115,7
<b>Meningkatnya Layanan Pengawasan</b>				
3	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	65	85,95	132,23
4	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	80	47,37	59,21
6	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan	85	77,05	90,65
<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>99,56</b>



No	Indikator Kinerja Program (IKP) 2022	Target	Capaian Kinerja	
			Realisasi	%
<b>Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah</b>				
1	Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	77	82,65	107,35
<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>				
2	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	78,50	92,10	117,32
<b>Meningkatnya Layanan Pengawasan</b>				
3	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	67	88	131,34
4	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	85	75	88,24
5	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan	87	71,62	82,32
<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>105,31</b>

No	Indikator Kinerja Program (IKP) 2023	Target	Capaian Kinerja	
			Realisasi	%
<b>Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah</b>				
1	Dukungan Pengawasan terhadap Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	73	79,02	108,25
2	Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	83	87,20	105,06
<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>				
3	Nilai Area Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	4,93	5,22	105,88
<b>Meningkatnya Layanan Pengawasan</b>				
4	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	88	88	100
5	Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	3	3	100
6	Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan	81	93,5	115,43
<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>105,77</b>

Dari tahun 2020 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan rata-rata persentase capaian kinerja kecuali di tahun 2021 mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :



**Grafik 31**  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023



Pada tahun 2023 rata-rata persentase realisasi capaian kinerja mengalami peningkatan dari tahun 2022 yaitu sebesar 0,46%. Terdapat beberapa kondisi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1 Pada tahun 2023 terdapat 6 IKP sedangkan pada tahun 2022 hanya 5 IKP.
- 2 Pada tahun 2023 terdapat penambahan 2 IKP yang semula belum ada di tahun 2022, yaitu :
  - IKP 1 Dukungan Pengawasan terhadap Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan
  - IKP 5 Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)
- 3 Terdapat 1 IKP yang semula ada di tahun 2022 tetapi tidak ada di tahun 2023, yaitu Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu
- 4 IKP Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan tahun 2022 berubah menjadi Nilai Area Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan, dengan meta indikator dan satuan target IKP berbeda, sehingga tidak dapat dibandingkan perbedaan realisasi/capaian tahun 2023 dengan 2022.
- 5 IKP Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan pada tahun 2022 berubah menjadi Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan, dengan meta indikator yang berbeda, sehingga tidak dapat dibandingkan perbedaan realisasi/capaian tahun 2023 dengan 2022
- 6 Terdapat 2 IKP yang tetap sama dari tahun 2022 dan 2023, yaitu Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti dan Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi
- 7 Realisasi IKP Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti mengalami peningkatan dari tahun 2022 dengan capaian yang mengalami penurunan dari tahun 2022 dikarenakan target tahunan 2023 yang mengalami kenaikan, pada tahun 2022 sebesar 77 menjadi 83.
- 8 Realisasi IKP Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi sama dengan tahun 2022 yaitu 88%, dengan capaian yang mengalami penurunan dikarenakan target tahunan 2023 yang mengalami kenaikan, pada tahun 2022 sebesar 67 menjadi 88.

### 3.2.3 Perbandingan Target Kinerja dengan Target Rencana Strategis

Pada tanggal 30 Desember 2022 telah ditetapkan Revisi Rencana Strategis 2020-2024. Kesesuaian antara target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 terhadap target kinerja pada Revisi Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024, dijelaskan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Program (IKP) 2023	Satuan	Target Revisi Renstra 2020-2024	Target PK 2023
<b>Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah</b>				
1	Dukungan Pengawasan terhadap Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	%	73	73
2	Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	%	83	83
<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>				
3	Nilai Area Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Nilai	4,93	4,93
<b>Meningkatnya Layanan Pengawasan</b>				
4	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	%		88
5	Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	Level		3
6	Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan	%		81

Tabel 3.3

Perbandingan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024

### 3.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Kinerja Serta Alternatif Solusi

#### SP 1 – Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah

Indikator Kinerja Program 1 yaitu Dukungan pengawasan terhadap Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan

Indikator Kinerja Program 2 yaitu Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti

#### 01 Indikator Kinerja Program 1 yaitu Dukungan pengawasan terhadap Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan

Capaian persentase hasil reviu laporan keuangan, dengan capaian kinerja tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

Dukungan pengawasan terhadap opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan



**Capaian Kinerja 2023**  
**108,25 %**  
atau 79,02  
dari Target sebesar 73

Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti didapat realisasi 87,20%

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi Sesuai}}{\sum \text{Rekomendasi Temuan}} \times 100\%$$

$$\frac{1315}{1508} \times 100\% = 87,20\%$$

Bobot Persentase Rekomendasi LHP BPK

$$87,20\% \times 50\% = 43,60\%$$

Persentase hasil reviu laporan keuangan didapat realisasi 70,83%

Persentase Reviu LK

$$\frac{\text{Persentase Tahunan} + \text{Persentase Semester I}}{2}$$

$$\frac{83,3 + 58,3}{2} = 70,83\%$$

Bobot Persentase Reviu LK

$$70,83 \times 50\% = 35,42\%$$

Dukungan pengawasan terhadap opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan diperoleh dari rata-rata capaian Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti dan persentase hasil reviu laporan keuangan

Opini BPK

Bobot Persentase Rekomendasi LHP BPK + Bobot Hasil Reviu LK

$$43,60\% + 35,42 = 79,02\%$$

Upaya pencapaian target kinerja Inspektorat Jenderal terhadap Dukungan pengawasan terhadap Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan tahun 2023 antara lain:

- Reviu Laporan Keuangan Tahunan TA 2022 Tingkat UAPPA/B E-1 BA 022 Kementerian Perhubungan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan kebijakan Transportasi Darat, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada tanggal 13 s.d. 17 Februari 2023;
- Reviu Laporan Keuangan Tahunan BA BUN 999.07 Tingkat Kementerian TA 2022 pada tanggal 8 s.d. 10 Februari 2023;
- Reviu Laporan Keuangan Tahunan TA 2022 UAPA BA 022 pada tanggal 8 s.d. 10 Februari 2023;
- Rapat Rekonsiliasi Tiga Pihak dalam rangka penyusunan Asersi Final Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2022 (Audited) pada tanggal 17 April 2023;
- Evaluasi pelaksanaan pelaporan keuangan BA BUN Belanja Subsidi Kementerian Perhubungan Tahun 2022 pada tanggal 3 s.d. 5 April 2023;
- Tindak lanjut (*action plan*) atas rekomendasi BPK RI terhadap Laporan Keuangan TA. 2022 pada tanggal 5 s.d. 7 Juni 2023;

**Lanjutan :** Upaya pencapaian target kinerja Inspektorat Jenderal terhadap Dukungan pengawasan terhadap Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan tahun 2023 antara lain:

- Reviu Laporan Keuangan Semester I BA. BUN 999.07 Tingkat Kementerian Perhubungan TA.2023 di Jakarta pada tanggal 13 s.d. 15 Juli 2023;
- Reviu Laporan Keuangan Semester I BA 022 Tingkat UAPPA-B E-1 TA. 2023 pada Ditjen Hubdat, BKT dan BPTJ di Jakarta pada tanggal 17 s.d. 22 Juli 2023;
- Reviu Laporan Keuangan Semester I BA. 022 Tingkat UAPA/B Kementerian Perhubungan TA.2023 pada tanggal 24 s.d. 28 Juli 2023;
- Reviu Laporan Keuangan BA. 022 Tingkat UAKPA Semester I TA 2023 pada Ditjen Hubla di NTT pada Juli 2023;
- Reviu Laporan Keuangan BA. 022 Tingkat UAKPA Semester I TA 2023 pada Ditjen Hubdat dan Ditjen Hubud di NTT pada Juli 2023;
- Menyampaikan Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Semester I BA.022 Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan surat PS. 302/5/11/ITJEN/2023 tanggal 4 Agustus 2023;
- Reviu Laporan Keuangan BA BUN 999.07 triwulan III Tingkat UAPA pada tanggal 12 s.d. 14 Oktober 2023;
- Reviu Laporan Keuangan BA. 022 triwulan III Tingkat UAPPA pada tanggal 16 s.d. 20 Oktober 2023;
- Reviu Laporan Keuangan BA. 022 triwulan III Tingkat UAPA pada tanggal 23 s.d. 27 Oktober 2023;
- Reviu Laporan Keuangan BA. 022 Tingkat Satker Sampling di Provinsi Jakarta Timur pada tanggal 27 November s.d. 01 Desember 2023;
- Reviu Laporan Keuangan BA. 022 Tingkat Satker Sampling di Sulawesi Selatan pada tanggal 27 November s.d. 01 Desember 2023;
- Reviu PIPK Tingkat UAKPA Satker Sampling pada tanggal 01 s.d. 15 Oktober 2023;
- Reviu PIPK Tingkat UAPPA Eselon I pada tanggal 11 s.d. 13 Desember 2023.

## 02 Indikator Kinerja Program 2 yaitu Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti



Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti

**105,06 %**

atau 87,20

dari Target sebesar 83

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi Sesuai}}{\sum \text{Rekomendasi Temuan}} \times 100\%$$

$$\frac{1.315}{1.508} \times 100\% = 87,20\%$$

Data yang dipakai adalah Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I tahun 2023 berdasarkan surat BPK RI Nomor 24/LHPt/XIV/07/2023 tanggal 24 Juli 2023





**Upaya pencapaian target kinerja Inspektorat Jenderal terhadap Dukungan pengawasan terhadap Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti tahun 2023 antara lain:**

- ▶ Pembahasan Rencana Aksi atas LHP BPK RI antara lain:
  - Pembahasan Rencana Aksi atas LHP BPK RI pada Direktorat Navigasi Penerbangan tanggal 1 Februari 2023
  - Pembahasan Rencana Aksi atas LHP BPK RI pada KSOP Patimban pada tanggal 3 Februari 2023;
  - Pembahasan Rencana Aksi atas LHP BPK RI Laporan Keuangan TA. 2022 pada tanggal 25 Mei 2023.

---

- ▶ Pembahasan Tindak Lanjut LHP BPK RI antara lain:
  - Pembahasan Tindak Lanjut Temuan LHP BPK atas Pembangunan Prasarana LRT Sumatera Selatan TA 2016-2019 pada tanggal 24 s.d. 25 Februari 2023 di Palembang;
  - Pembahasan Hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2022 dengan DPR RI pada tanggal 5 Juni 2023
  - Rapat Tindak Lanjut LHP BPK pada Biro Umum di Ruang Rapat Biro Umum pada tanggal 6 Juli 2023;
  - Rapat zoom pembahasan TL LHP BPK RI LK 2022 pada tanggal 31 Juli 2023;
  - Rapat zoom TL LHP BPK RI PDTT, PNBP, PSO Laut dan Patimban pada tanggal 14 September 2023;
  - Rapat TL LHP BPK RI LRT Sumsel pada tanggal 15 September 2023;
  - Menyiapkan bahan terkait progres TL LHP BPK 2023 (9 LHP baru) pada tanggal 5 s.d. 6 Oktober 2023;
  - Rapat monitoring TL LHP BPK RI pada Direktorat Kepelabuhanan pada tanggal 9 Oktober 2023;
  - Rapat monitoring TL LHP BPK RI pada Direktorat Bandar Udara pada tanggal 11 Oktober 2023;
  - Monitoring dan Evaluasi TL LHP BPK RI dan TL LHA Itjen ke BPTD Kalbar pada tanggal 24 s.d. 25 Oktober 2023;
  - Rapat pembahasan dokumen TL LHP BPK RI atas Pekerjaan LRT Sumsel pada tanggal 8 November 2023;
  - Rapat monitoring TL LHP BPK RI atas Pekerjaan LRT Sumsel pada tanggal 20 November 2023;
  - Rapat pembahasan TL LHP BPK RI pada Direktorat Prasarana pada tanggal 23 November 2023;
  - Rapat pembahasan TL LHP BPK RI PSO pada tanggal 18 Desember 2023;
  - Rapat pembahasan TL LHP BPK RI pada Direktorat Kepelabuhanan pada tanggal 19 Desember 2023.

---

- ▶ Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI antara lain:
  - Pemantauan TL LHP BPK RI pada tanggal 3 s.d. 6 Mei 2023 di Jakarta
  - Pemantauan TL LHP BPK RI di OP Tanjung Priok pada tanggal 7 Agustus 2023;
  - Pemantauan TL LHP BPK RI pada wilayah Maluku, Maluta, Papua, Papua Barat dan Sulut di Ternate pada tanggal 8-11 Agustus 2023;
  - Pemantauan TL LHP BPK RI pada wilayah DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim di Bandung pada tanggal 25 s.d. 28 September 2023;
  - Pemantauan TL LHP BPK RI di Bali pada tanggal 14 s.d. 18 November 2023;
  - Pemantauan TL Pusat LHP BPK RI pada Ditjen Darat pada tanggal 8 Desember 2023.

---

- ▶ Pemuktahiran Tindak Lanjut LHP BPK RI antara lain:
  - Entry Meeting Pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI posisi s.d. Semester I Tahun 2023 pada tanggal 26 Juni 2023;
  - Pemuktahiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI s.d. Semester I Tahun 2023 pada tanggal 26 Juni s.d. 7 Juli 2023;
  - Pemuktahiran TL LHP BPK RI posisi s.d. Semester II Tahun 2023 pada tanggal 20 s.d. 29 Desember 2023.

---

- ▶ Penyampaian surat Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Nomor PS.316/1/3/ITJEN/2023 tanggal 2 Jakarta 2023 perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok;

---

- ▶ Penyampaian surat Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Direktur Kepelabuhanan Nomor PS.316/1/6/ITJEN/2022 tanggal 3 Jakarta 2023 perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Direktorat Kepelabuhanan;

---

- ▶ Penerbitan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor KP 258 Tahun 2023 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan Asian Development Bank Loan No. 3792 INO Emergency assistance for Rehabilitation and Reconstruction pada Kementerian Perhubungan TA 2020;

---

- ▶ Mengadakan Sharing session permasalahan aset tanah di Kemenhub dan monitoring data TL LHA Itjen dan LHP BPK RI pada tanggal 12 s.d. 14 April 2023;





**Lanjutan :**

Upaya pencapaian target kinerja Inspektorat Jenderal terhadap Dukungan pengawasan terhadap Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti tahun 2023 antara lain:

- Pendampingan penelusuran aset peralatan dan mesin berupa PC dan laptop pada Pusbang Darat pada tanggal 12 s.d. 14 Juli 2023;
- Sharing Session terkait Permasalahan Aset dan Persiapan Pra PTL LHP BPK RI Semester II 2023 pada tanggal 12 s.d. 14 Desember 2023.

**SP 2 – Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**

Pencapaian SP 2 didukung oleh IKP 3 yaitu Nilai area penguatan pengawasan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan.

Capaian Kinerja Nilai Area Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan 2023

**105,88%**

atau 5,22

dari Target sebesar 4,93

IKP Nilai Area Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan tidak dapat direalisasikan sesuai dengan meta indikator yang telah ditetapkan. Pada periode penilaian tahun 2023, terdapat perubahan mekanisme Evaluasi Reformasi Birokrasi. Saat ini, Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Sesuai pedoman tersebut, Evaluasi Reformasi Birokrasi terdiri atas evaluasi internal dan evaluasi eksternal.

Evaluasi Internal dilaksanakan oleh APIP atau tim yang dibentuk secara khusus pada tahap perencanaan (ex-ante) dan tahap pelaksanaan (on-going) reformasi birokrasi. Evaluasi Eksternal dilakukan oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional pada tahap pasca pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi. Fokus evaluasi RB sendiri terbagi menjadi dua, yaitu RB General dan RB Tematik. Pada RB General akan dinilai kemajuan perbaikan tata kelola di internal Kementerian. Sementara RB tematik akan dinilai sejauh mana perbaikan tata kelola yang dilakukan dapat memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

Realisasi IKP Nilai Area Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan pada tahun 2023 dihitung dengan Hasil Evaluasi Internal pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan

**Hasil Evaluasi Ex Ante**

No	Penilaian	Bobot	Pilihan Jawaban	Nilai
<b>RB GENERAL</b>				
<b>A Penilaian Kegiatan Utama Road Map Reformasi Birokrasi</b>				
1	Penetapan Kegiatan Utama	15,63	A	15,63
2	Penetapan Target Indikator Kegiatan Utama	15,63	A	15,63
3	Keabsahan Rencana Aksi	6,5	Ya	6,25
<b>B Kriteria Penilaian Penetapan Rencana Aksi</b>				
4	Kelogisan Rencana Aksi	18,75	A	18,75
5	Relevansi dan Kecukupan Indikator Output	18,75	A	18,75
6	Ketepatan Penetapan Target Indikator Output	12,50	A	12,50
7	Anggaran	12,50	C	6,25
<b>NILAI EX ANTE</b>		<b>100</b>	<b>A</b>	<b>93,75</b>

Tabel 3.4  
Hasil Evaluasi Ex Ante

**Hasil Evaluasi On Going**

No	Penilaian	Bobot	Pilihan Jawaban	Nilai
1	Ketepatan pelaksanaan komponen kegiatan dibandingkan dengan maksud kegiatan yang disepakati ketika penyusunan rencana aksi	25	B	18,75
2	Ketercapaian output kegiatan pada setiap triwulan	25	B	18,75
3	Kualitas pelaksanaan kegiatan (manajemen/pengelolaan kegiatan)	25	A	12,5
	Perencanaan dan Pengorganisasian		A	
	Evaluasi Berkala		A	
4	Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang telah ditetapkan dalam rencana aksi	25	A	25
<b>NILAI RB GENERAL</b>		<b>100</b>	<b>A</b>	<b>87,50</b>

Tabel 3.5  
Hasil Evaluasi On Going

Hasil Evaluasi Internal pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan Tahun 2023 merupakan gabungan dari 40% nilai hasil evaluasi perencanaan RB dan 60% nilai hasil evaluasi pelaksanaan RB General, dengan perhitungan:

$$\begin{aligned}
 & 40\% \times \text{hasil ex ante} \\
 & 60\% \times \text{hasil on-going general} \\
 & 2\% \times \text{hasil on-going tematik} \\
 & \text{Nilai hasil evaluasi internal RB}
 \end{aligned}
 +$$



## Nilai Hasil Evaluasi Internal RB

90

ex ante	93,75	40%	37,50
on-going	87,50	60%	52,50

MEMUASKAN



Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan telah memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

### Upaya pencapaian target kinerja Inspektorat Jenderal terhadap Dukungan pengawasan terhadap Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti tahun 2023 antara lain:

- ▶ **Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi:**
  - Mengikuti undangan Biro SDMO perihal persiapan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan tahun 2023 pada tanggal 11 Mei 2023;
  - Mengikuti undangan Ditjen Hubdat perihal persiapan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi Ditjen Hubdat pada tanggal 22 Mei 2023
- ▶ **Pembahasan Road Map dan Penetapan Tema Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024:**
  - Mengikuti undangan Biro KIP perihal pembahasan penajaman Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 pada tanggal 24 Mei 2023;
  - Mengikuti undangan Biro KIP perihal pembahasan penetapan tema Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Perhubungan pada tanggal 31 Mei 2023;
  - Pembahasan Indikator dan Target atas Kegiatan Utama Sasaran Reformasi Birokrasi General pada tanggal 7 Juni 2023;
  - Mengikuti undangan Biro KIP perihal Penetapan Renaksi Reformasi Birokrasi Tematik dan general Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 pada tanggal 27 Juni 2023;
  - Mengadakan Focus Group Discussion Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 pada tanggal 14 Juli 2023.
- ▶ **Entry Meeting Evaluasi SAKIP, RB, dan ZI Tahun 2023 oleh Kementerian PAN dan RB, dan disampaikan Timeline Evaluasi RB Nasional Tahun 2023 pada tanggal 2 Agustus 2023;**
- ▶ **Evaluasi Internal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan:**
  - Permintaan Nama Tim Evaluasi Internal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan pada tanggal 18 Agustus 2023;
  - Rapat Persiapan Evaluasi Internal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan dan
  - Pembahasan Rencana Aksi dan Progres Capaian atas Kegiatan Utama pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan pada tanggal 30 Agustus 2023;
  - Rapat Persiapan Evaluasi Internal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian pada tanggal 4 September 2023 pada tanggal 31 Agustus 2023;
  - Telah disusun konsep Surat Keputusan Inspektur Jenderal tentang Tim Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023;
  - Telah disusun rancangan Lembar Kerja Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023;
  - Bimbingan Teknis Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi pada tanggal 14 s.d 16 September 2023
  - Rapat pembahasan Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023 pada tanggal 22 September 2023;
  - Rapat Pemantauan Progres Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan pada tanggal 5 Oktober 2023;
  - Pembahasan Hasil Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023 pada tanggal 9 s.d. 11 Oktober 2023;
  - Rapat Pembahasan Simpulan dan Catatan Hasil Sementara Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023 pada tanggal 18 Oktober 2023;

**Lanjutan :** Upaya pencapaian target kinerja Inspektorat Jenderal terhadap Dukungan pengawasan terhadap Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti tahun 2023 antara lain:

- Rapat Pembahasan Simpulan dan Catatan Hasil Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023;
  - Penyusunan bahan pembahasan hasil evaluasi internal reformasi birokrasi dan upaya peningkatan reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan pada bulan November 2023.
- Menghadiri Sosialisasi Portal RB Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB secara daring pada tanggal 22 September 2023 pada tanggal 19 September 2023;
- Menghadiri Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi “Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Birokrasi Tangkas dan Berdampak” pada tanggal 11 s.d. 12 Oktober 2023;
- Sosialisasi Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan di Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2023
- “Meningkatkan Kualitas Pengawasan melalui Program Stranas PK, Tindak Lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas dan Implementasi Manajemen Risiko” pada tanggal 20 Oktober 2023;
- Melaksanakan input data perencanaan dan pelaksanaan RB pada portal RB Nasional;
- Rapat pembahasan revisi target dan rencana aksi RB General dan RB Tematik Kementerian Perhubungan Tahun 2024 pada tanggal 7 s.d. 9 Desember 2023;
- Pembahasan praktik baik pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan tunjangan kinerja pada
- Kementerian PUPR dengan Narasumber dari Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR pada tanggal 12 Desember 2023





### SP 3 – Meningkatnya Layanan Pengawasan

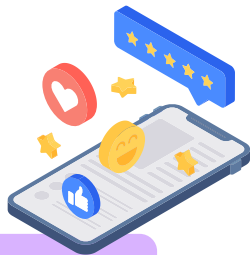
Indikator Kinerja Program 4 yaitu Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi.

Indikator Kinerja Program 5 yaitu Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (IACM).

Indikator Kinerja Program 6 yaitu Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan.

Indikator Kinerja Program 4 yaitu Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi.

Audit dilakukan oleh Inspektorat Jenderal



Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi

**100 %** atau 88  
dari Target sebesar 88

Kuisisioner Semester II 2022 & Semester I 2023  
114 UPT dan 420 responden  
Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan

Auditi / UPT yang telah selesai pemeriksaan dan masuk dalam rencana pengawasan

- 15 Auditi di lingkungan BPSDM
- 19 Auditi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- 47 Auditi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
- 28 Auditi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- 5 Auditi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretapihan.

#### Upaya Pencapaian Target

- Mengadakan forum diskusi Survei Kepuasan Pengawasan tahun 2023 pada tanggal 24-26 Mei 2023.
- Mengadakan Rapat Persiapan Entry Meeting Survei Kepuasan Pengawasan pada tanggal 4 Juli 2023;
- Telah dilakukan penyebaran kuisisioner Survei Kepuasan Pengawasan melalui <https://bit.ly/SurveyWas2023>
- Pengisian Kuisisioner dilakukan dari tanggal 7 Juli s.d. 21 Agustus 2023;
- Mengadakan Rapat progress pelaksanaan Survei Kepuasan Pengawasan pada tanggal 25 Agustus 2023;
- Telah diperoleh hasil sementara dari survei kepuasan pengawasan tetapi masih harus dilakukan uji petik di 16 satker responden;
- Melaksanakan uji petik di 16 satker responden pada akhir Agustus - awal September 2023;
- Penyampaian laporan akhir survei kepuasan pengawasan kepada pimpinan melalui nota dinas nomor 04/SETTJEN/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023.





Indikator Kinerja Program 5 yaitu Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (IACM).

Penilaian dilakukan oleh Instansi pembina terkait (BPKP)

Penilaian dilakukan setiap tahun

dengan metode pendekatan Internal Audit Capability Model (IACM)

Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)

**100%** atau 3  
dari Target sebesar 3

### Upaya Pencapaian Target

- Telah terbit SK Irjen Nomor KP-ITJEN 31 Tahun 2023 tanggal 9 Maret 2023 tentang Satgas Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2023;
- Rapat Kick Off Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2023 pada tanggal 15 Maret 2023;
- Rapat Monitoring Area of Improvement dan Persiapan Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP tahun 2023 pada tanggal 5 April 2023
- Bimbingan Teknis Satgas Peningkatan Kapabilitas APIP dan Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2023 pada tanggal 4 s.d. 6 April 2023;
- Rapat pembahasan jadwal dan mekanisme pelaksanaan penilaian mandiri oleh tim asesor peningkatan kapabilitas APIP pada tanggal 29 Mei 2023;
- Rapat monitoring pengisian dan pemenuhan data dukung kertas kerja penilaian mandiri peningkatan kapabilitas APIP pada tanggal 31 Mei 2023;
- Rapat Expose Hasil Sementara Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2023 oleh Tim Asesor pada tanggal 16 Juni 2023;
- Melaksanakan Panel Finalisasi Simpulan Penilaian Mandiri dan Penyusunan Rencana Aksi Area of Improvement Kapabilitas APIP Tahun 2023 pada tanggal 23 Juni 2023.
- Menyampaikan Hasil Finalisasi Kertas Kerja Penilaian Mandiri dan Rencana Aksi Area of Improvement Kapabilitas APIP Kementerian Perhubungan Tahun 2023 kepada seluruh Inspektorat dan Bagian pada tanggal 10 Juli 2023;

- Telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 69 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Menghadiri Sharing Session Peningkatan Kapabilitas APIP pada tanggal 31 Juli 2023;
- Menyampaikan Hasil Finalisasi Kertas Kerja Penilaian Mandiri dan Rencana Aksi Area of Improvement Kapabilitas APIP Kementerian Perhubungan Tahun 2023 kepada seluruh Inspektorat dan Bagian;
- Entry Meeting dan Evaluasi Kapabilitas APIP Tahun 2023 di Lingkungan Kementerian Perhubungan bersama Tim Evaluator dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 21 Agustus 2023;
- Monitoring Data Dukung dan Rencana Aksi Area of Improvement Penilaian Kapabilitas APIP pada tanggal 9 Agustus 2023;
- Melaksanakan koordinasi pemenuhan kelengkapan data dukung dengan tim evaluator BPKP;
- Rapat Pembahasan dan Pendalaman Tim Evaluator BPKP terhadap Isian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2023 pada tanggal 6 Oktober 2023;
- Exit Meeting Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2023 pada tanggal 27 Oktober 2023
- Rapat Pembahasan Notisi Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Kementerian Perhubungan Tahun 2023 pada tanggal 14 November 2023;
- Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP Kementerian Perhubungan Tahun 2023 pada tanggal 11 Desember 2023.

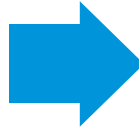






**Indikator Kinerja Program 6 yaitu Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan.**

Merupakan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat maupun instruksi dari pimpinan setelah tahap penelitian materi pengaduan telah cukup dan layak untuk dilaksanakan.



**Persentase Penyelesaian  
Penanganan Pengaduan**

**115,43 %**  
atau 93,5  
dari Target sebesar 81

**93 Laporan Pengaduan**

87 laporan dengan status tuntas  
23 laporan dengan status spam  
49 laporan dengan status selesai

8 laporan dengan status diilmpahkan  
7 laporan dengan status dibolak  
6 laporan pengaduan yang belum tuntas

**Upaya Pencapaian Target**

- ▶ Focus Group Discussion dengan tema "Digitalisasi Layanan Penanganan Pengaduan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)" pada tanggal 26 s.d. 27 Juni 2023;
- ▶ Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT), antara lain:
  - ADTT pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Utara di Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 3 s.d. 12 Juli 2023;
  - ADTT atas penyelesaian Menara Suar Mahoro tanggal 13 s.d. 22 Juli 2023;
  - Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik ASN di Tangerang Provinsi Banten tanggal 3 s.d. 12 Agustus 2023;
  - ADTT atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik ASN di Provinsi Banten dan Kalimantan Timur tanggal 3 s.d. 12 Agustus 2023
  - Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Pekerjaan Revitalisasi Terminal Tipe A Purboyo Kota Madiun pada BPTD Kelas II Provinsi Jawa Timur tanggal 13 s.d. 21 Agustus 2023;
  - ADTT atas Pengaduan Masyarakat pada Kantor Distrik Navigasi Kelas I Belawan di Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 15 Oktober s.d. 21 Oktober 2023
- ▶ Reviu atas pengaduan, antara lain:
  - Reviu atas Pengaduan Masyarakat pada salah satu UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 23 s.d. 29 Juli 2023;
  - Reviu lanjutan terhadap Kasus Pengaduan pada Politeknik Penerbangan Jayapura di Provinsi Papua tanggal 7 s.d. 11 Agustus 2023;
  - TL Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan Tanah pada Distrik Navigasi Kelas II Benoa tanggal 7 s.d. 11 Agustus 2023;
  - Reviu Penyelesaian Permasalahan lahan Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas I Juwata Tarakan di Provinsi Kalimantan Utara tanggal 18 s.d. 23 September 2023;
  - Melaksanakan Pemeriksaan atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Auditor di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Kalimantan Timur tanggal 14 s.d. 20 September 2023;
  - Reviu atas Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan Terminal Khusus di Wilayah Kerja KSOP Kelas II Palembang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 21 s.d. 27 September 2023;

- Reviu Pengaduan Dugaan ASN Kantor Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) yang Melakukan Poligami di Provinsi Banten tanggal 25 s.d. 29 September 2023.
- Reviu Lanjutan Terhadap Pengaduan atas Masalah Kepegawaian pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta pada tanggal 30 Oktober s.d. 07 November 2023;
- Reviu Kasus dan Pengumpulan Bahan Keterangan Dugaan Penyalahgunaan Fasilitas Rumah Dinas di Provinsi Bengkulu pada tanggal 30 Oktober s.d. 04 November 2023;
- Reviu atas Pengaduan Masyarakat Pada Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 18 Oktober s.d. 27 Oktober 2023;
- Pengumpulan Bahan dan Keterangan Terhadap Pengaduan atas Pelayanan Publik pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 09 Oktober s.d. 13 Oktober 2023;
- Penanggung jawab Kegiatan Reviu Lanjutan Penyelesaian Permasalahan Lahan UPBU Kelas I Juwata Tarakan di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat pada tanggal 20 November s.d. 27 November 2023;
- Reviu Pengaduan Tindakan Indisipliner Pegawai Biro Komunikasi dan Informasi Publik di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat pada tanggal 23 November s.d. 29 November 2023;
- Penanggung Jawab Kegiatan Reviu Lanjutan Penyelesaian Permasalahan Tanah Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas I Juwata Tarakan di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat pada tanggal 20 November s.d. 27 November 2023;
- Penanggung Jawab Kegiatan Reviu Kasus dan Pengumpulan Bahan Keterangan Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Purboyo Kota Madiun pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 15 November s.d. 21 November 2023;
- Reviu Kasus Pengaduan pada Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Barat perihal Pembangunan Jalur Kereta Api Kiaracandong-Cicalengka di Provinsi Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 10 November s.d. 16 November 2023;
- Penanggung jawab Kegiatan Reviu Pekerjaan Belanja Modal pada Distrik Navigasi Kelas I Bitung di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten pada tanggal 07 Desember s.d. 15 Desember 2023;
- Reviu Atas Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh PT. Sumber Gunung Maju Ukirsari di Provinsi Banten pada tanggal 07 Desember s.d. 12 Desember 2023.
- ▶ Evaluasi Peran Pengawasan APIP melalui Penerapan Manajemen Risiko, Penanganan Pengaduan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya TA. 2023 pada tanggal 04 Desember s.d. 06 Desember 2023;





### 3.2.5 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Merupakan kemampuan Inspektorat Jenderal dalam memanfaatkan suatu nilai potensi yang dimiliki, untuk tercapainya tujuan organisasi yang dilaksanakan secara tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu

Efisiensi Sumber Daya terhadap kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK



### 3.3 Realisasi Anggaran



No	Unit Kerja	Pagu Awal	Pagu Blokir	Pagu Efektif
1	Inspektorat I	4.998.968.000	200.000.000	4.798.968.000
2	Inspektorat II	3.679.513.000	100.000.000	3.579.513.000
3	Inspektorat III	8.291.519.000	390.000.000	7.901.519.000
4	Inspektorat IV	6.000.000.000	250.000.000	5.750.000.000
5	Inspektorat Investigasi	5.000.000.000	200.000.000	4.800.000.000
6	Sekretariat Inspektorat Jenderal	68.676.131.000	866.844.000	67.809.287.000
rslmul		96.646.131.000	2.006.844.000	94.639.287.000

Tabel 3.6  
Pagu Anggaran dan Pagu Efektif Inspektorat Jenderal per Unit Kerja





No	Unit Kerja	Pagu Setelah diblokir	Pagu Revisi antar KRO	Penambahan Anggaran	Pagu Akhir	Realisasi	%
1	Inspektorat I	4.798.968.000	4.798.968.000	0	4.798.968.000	4.798.898.578	100
2	Inspektorat II	3.579.513.000	3.579.513.000	0	3.579.513.000	3.579.404.048	100
3	Inspektorat III	7.901.519.000	7.901.519.000	0	7.901.519.000	7.896.271.550	100
4	Inspektorat IV	5.750.000.000	5.750.000.000	0	5.750.000.000	5.749.941.529	100
5	Inspektorat Investigasi	4.800.000.000	4.800.000.000	0	4.800.000.000	4.799.057.243	99,98
6	Sekretariat Inspektorat	67.809.287.000	67.809.287.000	7.175.496.000	74.989.783.000	74.970.621.132	99,97
<b>Jumlah</b>		<b>94.639.287.000</b>	<b>94.639.287.000</b>	<b>7.175.496.000</b>	<b>101.814.783.000</b>	<b>101.794.194.080</b>	<b>99,98</b>

**Tabel 3.7**

Pagu Akhir Inspektorat Jenderal per Unit Kerja

No	Belanja	Pagu Awal	Pagu Efektif	Revisi Anggaran	Pagu Akhir	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	38.870.892.000	38.870.892.000	7.175.496.000	46.046.388.000	46.036.313.174	99,98
2	Belanja Barang	53.057.739.000	51.257.739.000	240.703.000	51.498.442.000	51.491.506.559	99,99
3	Belanja Modal	4.717.500.000	4.510.656.000	(240.703.000)	4.269.953.000	4.266.374.347	99,92
<b>Jumlah</b>		<b>94.639.287.000</b>	<b>94.639.287.000</b>	<b>7.175.496.000</b>	<b>101.814.783.000</b>	<b>101.794.194.080</b>	<b>99,98</b>

**Tabel 3.8**

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal per Jenis Belanja

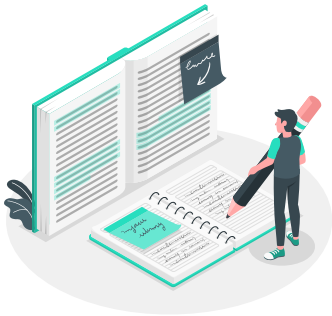


# BAB IV

# PENUTUP



## 4.1 Kesimpulan



Secara umum pada tahun 2023 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan baik, hal tersebut tercermin berdasarkan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 105,77% dari 6 IKP;

Seluruh Indikator Kinerja Program (IKP) tahun 2023 telah memenuhi target kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja sebagai berikut:

### Indikator Kinerja Program (IKP) 1

Capaian Kinerja

**108,25%;**

Dukungan Pengawasan terhadap Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan

### Indikator Kinerja Program (IKP) 2

Capaian Kinerja

**105,06%**

Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti

### Indikator Kinerja Program (IKP) 3

Capaian Kinerja

**105,88%**

Nilai Area Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan

### Indikator Kinerja Program (IKP) 4

Capaian Kinerja

**100%**

Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi, dengan capaian kinerja

### Indikator Kinerja Program (IKP) 5

Capaian Kinerja

**100%**

Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (IACM) kinerja

### Indikator Kinerja Program (IKP) 6

Capaian Kinerja

**115,43%**

Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu IKP 3 Nilai Area Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan yang tidak dapat direalisasikan sesuai dengan meta indikator yang telah ditetapkan. Dikarenakan pada periode penilaian tahun 2023, terdapat perubahan mekanisme Evaluasi Reformasi Birokrasi. Saat ini, Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

## 4.2

## Saran Tindak Lanjut

Dalam rangka upaya perbaikan dan komitmen terhadap peningkatan kinerja di masa mendatang diperlukan beberapa langkah strategis sebagai berikut.

1. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pegawai melalui Implementasi inovasi penerapan Data Analytics (DA) dengan Teknik Audit berbantuan Komputer (TABK) dan Continuous Audit (CA) serta Integrasi Sistem (Internal & Eksternal);
2. Meningkatkan kompetensi SDM serta membangun awareness pada masing-masing pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal;
3. Menjadi inisiator dalam penyusunan peraturan terkait dengan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Melaksanakan evaluasi terhadap Revisi Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024;
5. Melaksanakan sosialisasi aplikasi Sistem Tanya dan Konsultasi (Sitakon) kepada Unit Kerja atau pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Perlunya partisipasi dari seluruh unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan menetapkan Sasaran Program (SP) atau Indikator Kinerja Program (IKP) atau di Unit Eselon II dibawahnya, terkait penyelesaian rekomendasi LHP BPK sebagai target kinerja jangka pendek maupun menengah, serta dukungan pemanfaatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tindak lanjut.





No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan (Bulan)												Anggaran	Penanggungjawab			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	Pengawasan intern yang memberikan nilai tambah	1 Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	%	85	<b>Pelaksanaan Audit Kinerja</b>													15.823.096.000	Inspektur I s.d IV dan Sekretariat Inspektorat Jenderal			
					<b>Pelaksanaan Reviu</b>																	
					1 Melaksanakan Reviu PIPK Tahunan Tingkat Kementerian dan Eselon I, serta Satker Sampling																	
					2 Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan BA 999 dan BA 022 Kementerian Perhubungan																	
					3 Melaksanakan Reviu RKA Tahun 2023 di Lingkungan Kementerian Perhubungan																	
					4 Melaksanakan Reviu RKBMN di Lingkungan Kementerian Perhubungan																	
					<b>Pemutakhiran TLHP BPK dan BPKP</b>																1.250.000.000	
					1 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Pengawasan BPKP																	
					2 Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di Lingkungan																	
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	2 Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	Nilai	78,5	1 Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal dan Tim PMPRB Kemhub Tahun 2022												1.225.000.000	Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Inspektur Investigasi				
					2 Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Quick Wins dan Program Agen Perubahan Tahun 2021																	
					3 Penyusunan dan pembahasan program kerja Reformasi Birokrasi dan Quick Wins, serta Rencana Aksi Program RB Inspektorat Jenderal Tahun 2021																	
					4 Pelaksanaan pengelolaan ketatusahaan dalam rangka meningkatkan nilai hasil antara area penataan tata laksana																	
					5 Pelaksanaan pemantauan Unit Kepatuhan Internal (UKI) dalam rangka pemenuhan area penguatan pengawasan																	
					6 Penyusunan pedoman pelaksanaan organisasi dan tata kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam rangka pemenuhan area penataan organisasi																	







No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan (Bulan)												Anggaran	Penanggungjawab
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					<b>Budaya dan Hubungan Organisasi</b>														
					26 Pengelolaan kemitraan dan kerjasama pengawasan													600.000.000	
					<b>Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja</b>														
					27 Penyusunan Rencana Kinerja dan Evaluasi Kinerja serta Implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal													1.984.166.000	
					28 Telaah Sejawat													266.924.000	
					29 Penjaminan Kualitas dan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Implementasi SPIP													640.823.000	
					30 Pengelolaan Zona Integritas													150.000.000	
3	Meningkatnya layanan pengawasan	3 Tingkat kepuasan pengawasan oleh Auditi	%	67	<b>Survei Kepuasan Pengawasan</b>													502.199.000	Inspektorat Investigasi
					1 Workshop mengundang Narasumber dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perikanan dan Kelautan terkait mekanisme pelaksanaan dan pembuatan aplikasi Survey Kepuasan Pengawasan														
					2 Pelaksanaan Survey ke UPT yang telah ditentukan (Semester I)														
					3 Pelaksanaan Survey ke UPT yang telah ditentukan (Semester II)														
					4 Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Pengawasan														
					<b>Pemantauan, Pengawasan dan Supervisi</b>													650.000.000	
					1 Monitoring Lebaran, Natal dan Tahun Baru														
					2 Koordinasi Kelembagaan														
					<b>Pencegahan KKN (Identifikasi Area Rawan Korupsi)</b>													156.000.000	
					1 Study Banding Identifikasi Rawan KKN														
					2 Workshop / sharing sesion dengan KPK dan ICW untuk mengidentifikasi rawan KKN. Peserta dari IT. Investigasi dan mengundang Unit Eselon I untuk memberikan masukan titik-titik rawan KKN di lingkungan Unit Eselon I masing masing														
					3 Pelaksanaan Koordinasi dengan stakeholder Asosiasi Pelayaran (2 asosiasi) dan Asosiasi Darat (Organda)														



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan (Bulan)												Anggaran	Penanggungjawab
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					<b>Pengawasan dan Pengendalian CPNS</b>													150.000.000	
					1 Pelaksanaan Wasdal CPNS Pola Pembibitan														
					2 Pelaksanaan Wasdal CPNS Umum														
		4	Persentase tindak lanjut penanganan konsultasi pengawasan tepat waktu	%	85	1 PIC Inspektorat melakukan pengecekan pesan konsultasi dari pengguna/ user pada aplikasi SITAKON secara rutin													- Inspektorat I s.d IV
					2 PIC Inspektorat melakukan verifikasi pertanyaan/ konsultasi dari pengguna/ user														
					3 Menjawab pertanyaan/ konsultasi dari pengguna/ user (PIC/ Korwil)														
					4 Merekapitulasi Pertanyaan dan Konsultasi														
					5 Melaporkan hasil monitoring penanganan konsultasi														
		5	Persentase tindak lanjut pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan	%	87	<b>Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SIMADU)</b>												2.897.801.000	Inspektorat Investigasi
					1 Evaluasi dan kompilasi Semester I kegiatan SIMADU														
					2 Evaluasi dan kompilasi Semester II kegiatan SIMADU														
					3 Pelaksanaan Koordinasi dan Persiapan untuk Pembangunan Big Data Analytics														
					<b>Audit Dengan Tujuan Tertentu</b>														
					1 Reviu Kasus														
					2 ADTT Atas Pengaduan														
					3 ADTT Terprogram														
					<b>Pemutakhiran TLHA</b>														
					1 Pemutakhiran TLHA ke Lokasi Auditi														



**INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI  
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
GD. KARSA LT. 6, JAKARTA PUSAT 10110**

